

# Kebijakan AS Versus Islam Politik

Oleh Alex Sobur

Agaknya, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Barack Hussein Obama ingin bisa memiliki peran penting di negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia. Setidaknya, hal itu tecermin dari keterangan pers Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton se usai kunjungannya ke Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu (18/12), yang mengatakan, membangun kemitraan dengan Indonesia merupakan langkah penting bagi pemerintah AS. Benarkah Indonesia begitu penting bagi AS? Bagaimana kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Obama, khususnya di Timur Tengah? Bagaimana Obama menyikapi isu "kebangkitan" Islam politik? Bisakah Obama bekerja sama dengan dunia Muslim?

Sebagai bagian dari diplomasi internasional smart power, menurut Hillary, AS tak ingin hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan apa kata dunia. Demokrasi Islam dan negara-negara maju tak cukup hanya hidup berdampingan, tapi juga harus maju bersama.

Apa pun kata dunia dan seberapa besar pun orang berharap, Obama tetaplah Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan menentukan kebijakan luar negerinya tidak keluar dari garis kepentingan nasional AS. Selain presiden, sebetulnya masih ada "kekuatan" lain, yakni Kongres (Congress), lembaga legislatif nasional AS, yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Fungsi utama Kongres dalam politik luar negeri berada dalam kerangka pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang ditetapkan para pendiri negara. Kendati Obama sebagai presiden memiliki tanggung jawab menyelenggarakan politik luar negeri, termasuk di kawasan Timur Tengah, namun dana yang diperlukan harus ditetapkan Kongres, dengan pengajuan anggaran bermula dari Gedung Putih; dan presiden tidak dapat memberlakukan perjanjian atau ikatan tanpa disepakati terlebih dahulu oleh Senat.

Lebih daripada di negara mana pun di dunia, Kongres memainkan pengaruh yang menentukan bagi kebijakan AS terhadap Timur Tengah, dengan tampilnya lembaga ini sebagai pengambil keputusan dalam tiga dekade terakhir, meski presiden punya daya dan ruang gerak lebih besar di bidang geopolitik ini. Tokoh-tokoh pemerintahan Clinton, seperti dituturkan Fawaz A. Gerges (1999) dalam bukunya *America and Political Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?* menunjukkan ketidaksukaan mereka akan suasana umum di Kongres. Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional menyatakan, Kongres dan publik menganut pandangan-pandangan "simplistik" dan "berprasangka" terhadap Islam dan Muslim.

Islam politik, sebagai mana digambarkan John L. Esposito (1997) dalam *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* telah terbukti merupakan kekuatan politik yang tangguh, meskipun sering kali gerakan atau organisasi Islam hanya merupakan kelompok minoritas di masyarakat. Islam politik juga terbukti menarik dan efektif dalam menanggapi kegagalan sosioekonomi dan politik dari pemerintah dan kaum elite: persoalan sektarian, kesukuan, dan kekecewaan kelas; warga negara kelas dua dalam pengertian akses pada pendidikan dan lapangan pekerjaan; ketidakmerataan distribusi kesejahteraan; korupsi pejabat.

## Kebangkitan Islam

Belakangan ini, setidaknya dalam dua dekade terakhir, selain demokratisasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), wacana yang muncul ke permukaan dalam khazanah politik internasional, khususnya yang berkaitan dengan persoalan religiopolitik, adalah mengenai "kebangkitan" Islam politik, seperti merebaknya fenomena "fundamentalisme" Islam. Dalam sejumlah literatur, istilah Islam politik, "fundamentalisme" atau "neofundamentalisme" atau "revivalisme" Islam memiliki substansi yang sulit dibedakan satu sama lain. John L. Esposito (1997), misalnya, menyamakan istilah Islam politik dengan "fundamentalisme Islam" (ditulis dalam tanda kutip) atau gerakan-gerakan Islam lainnya. Sementara, Oliver Roy (1994) cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik. Roy lebih spesifik merujuk pada apa yang ia sebut sebagai gerakan neofundamentalism yang, antara lain, menghendaki pemberlakuan syariat Islam.

Menurut Gerges, profesor dalam Studi Politik Internasional dan Timur Tengah di Sarah Lawrence College, sejumlah pejabat AS telah mengungkapkan bahwa persepsi publik dan Kongres tentang Islam memang berpengaruh dan membatasi proses perumusan kebijakan. Penggambaran gerakan Islam sebagai kekuatan jahat, menurut seorang mantan pejabat Deplu, membuat AS sulit mengambil kebijakan yang konstruktif.

Pada dekade 1970-an, Dunia Muslim mengalami apa yang disebut kalangan pengamat dan kaum Muslim sendiri sebagai "kebangkitan Islam". Dimulai dengan embargo minyak 1973 yang dipuncaki Revolusi Islam Iran Ayatollah Khomeini pada 1979, semangat revivalisme Islam terus menemukan momentumnya. Ketakutan Barat terhadap Islam yang dalam beberapa waktu terpendam (dormant) kembali bangkit. Apa yang disebut sebagai "Muslim-phobia" menyebar di kalangan politisi dan sarjana Barat. Dengan keruntuhan komunisme, sejumlah politisi dan sarjana Barat menciptakan musuh baru, Islam dan kaum Muslim.

Pencitraan Islam macam ini agaknya disebabkan sedikitnya dua faktor, pertama, ketakutan yang dibesar-besarkan, dan kedua, pandangan yang monolitik terhadap Islam dan kaum Muslim.

Citra Barat tentang Islam dan kaum Muslim sebagai kekuatan monolitik, seperti argumen Azyumardi Azra (1996), jelas keliru besar. Pada dasarnya, kaum Muslim itu sangatlah beragam, tidak hanya pada tingkat keagamaan, namun juga pada tingkat politik, ekonomi, sosial, kultural, dan lainnya. Pemerintah negara-negara Muslim juga mempunyai keragaman dalam hubungan dengan Barat. Sebagian besar mempertahankan hubungan baik dengan Barat, sebagian kecil, seperti Arab Saudi atau negara-negara Teluk bahkan menjadi sekutu "setia" Barat, dan sebagian kecil lagi, seperti Iran dan Libia terlihat dalam konfrontasi dengan Barat.

Meski banyak pihak yang pesimistis terhadap Obama, kita patut menaruh sedikit harapan. Bila dibandingkan dengan presiden-presiden AS sebelumnya, Obama memiliki informasi dan kedekatan emosi yang lebih banyak tentang Islam, Arab, dan konflik di Timur Tengah.

Karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat akan kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Di sini, kita berharap Obama dapat menemukan kekuatannya dan menjaga hati nuraninya, terutama dalam menyelamatkan anak-anak Palestina. \*\*\*

Penulis, dosen Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik Fikom Unisba, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengabdian Sosial Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Cabang Bandung.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Sabtu, 21 Februari 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=60393>